



PEMERINTAH KABUPATEN

TANAH DATAR

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**RANCANGAN
PERUBAHAN
RENJA**

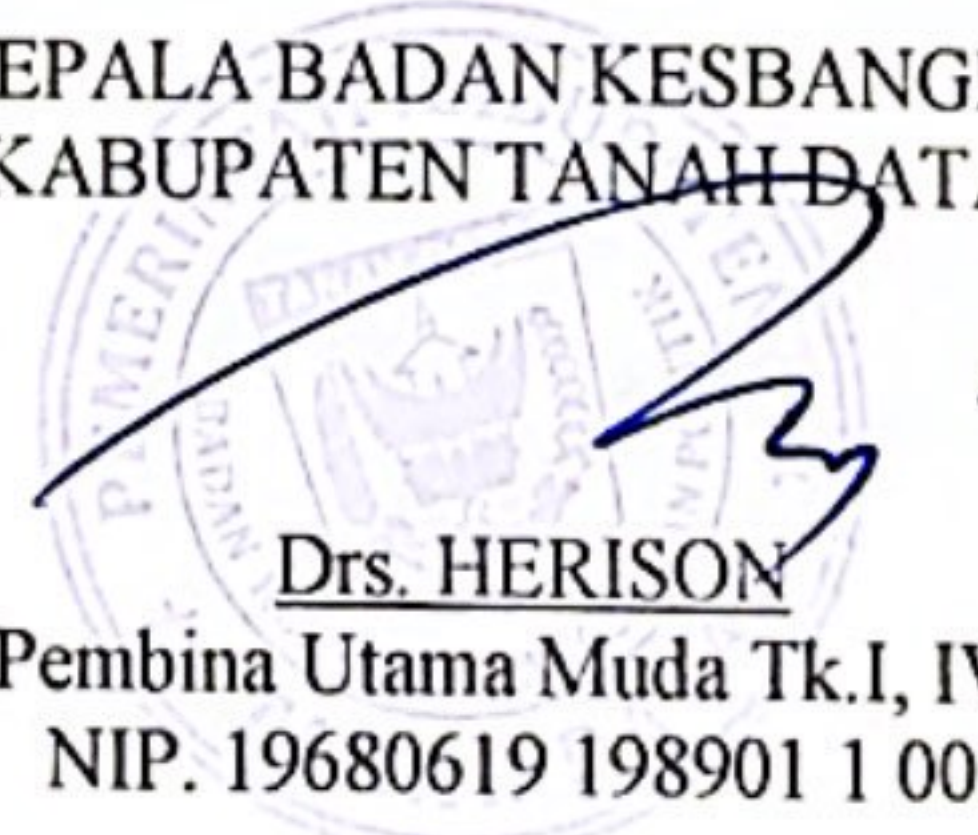
**TAHUN
2025**

KATA PENGANTAR

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sebagai rangkaian dokumen perencanaan pembangunan daerah, Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 s/d 2026.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan merupakan Perencanaan Tahunan dari Rencana Strategis yang berjangka waktu lima tahun. Rencana Kerja Perubahan memberikan gambaran lebih mendetail tentang sasaran serta program dan kegiatan yang ditetapkan sebagai suatu strategi untuk mencapai sasaran tersebut, sehingga dalam dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dengan indikator output dan indikator outcomes yang akan dicapai.

Dalam penyusunan Renja perubahan ini, masukan dan saran tentunya sangat diharapkan untuk dapat lebih menyempurnakan Renja perubahan Badan menuju Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar yang responsive dan aspiratif.

Batusangkar, 2025
KEPALA BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN TANAH DATAR

Drs. HERISON
Pembina Utama Muda Tk.I, IV/c
NIP. 19680619 198901 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	01
1.1. Latar Belakang	01
1.2. Landasan Hukum.....	04
1.3. Maksud dan Tujuan.....	04
1.4. Sistematika Penulisan	05
BAB II. CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025	06
2.1. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar	06
2.2. Realisasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Anggaran Rencana Kerja.....	08
BAB III. FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENILAIAN KINERJA	15
3.1 Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja.....	15
3.2 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja.....	15
BAB IV. PENUTUP	16
4.1 Kesimpulan.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan : 1). teknokratif, 2). partisipatif, 3). politis, serta 4). atas bawah dan bawah atas.

Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari nagari/desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional.

Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi menggunakan pendekatan 1). holistik-tematik, 2). integratif dan 3). spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan daerah terdiri atas; 1). RPJPD, 2). RPJMD, dan 3). RKPD. Sedangkan Rencana Perangkat Daerah terdiri atas; 1). Renstra Perangkat Daerah, dan 2). Renja Perangkat Daerah. Dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah, Badan Kesbangpol melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Baperlitbang dan pemangku kepentingan.

Renja Perubahan Badan Kesbangpol memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Badan Kesbangpol disusun dengan tahapan:

- 1). persiapan penyusunan;
- 2). penyusunan rancangan awal;
- 3). penyusunan rancangan;
- 4). pelaksanaan forum internal Perangkat Daerah;
- 5). pelaksanaan forum lintas Perangkat Daerah;
- 6). perumusan rancangan akhir; dan
- 7). Penetapan;

Pembangunan daerah pada dasarnya merupakan segala upaya yang dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan teknologi, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan, sesuai dengan kondisi, potensi, serta permasalahan di masing-masing daerah.

Keberhasilan pembangunan daerah adalah keberhasilan dari pencapaian semua prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD Tahun 2025 terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Dengan adanya Rencana kerja ini maka seluruh proses kegiatan pelaksanaan kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar berjalan dengan

Sistem yang jelas dan terukur, baik disegi Ketahanan Bangsa, Kesatuan Bangsa dan Politik yang ada di Daerah Kabupaten Tanah Datar.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 disusun berdasarkan perangkat regulasi sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara iRepublik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 3 Seri E)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 29);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renja Perubahan Badan Kesbangpol Tahun 2025 adalah menyesuaikan rencana kerja tahunan yang telah dibuat sebelumnya dengan kondisi dan situasi yang berubah, baik itu karena adanya perubahan kebijakan, anggaran, atau hal lain yang mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah :

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana.

2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program / kegiatan selama 1 tahun oleh Perangkat Daerah.
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil.
4. Langkah-langkah/kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannya.
5. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

- BAB I : PENDAHULUAN**
- 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II : CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I PADA BADAN KESBANGPOL KABUPATEN TANAH DATAR**
- 2.1. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama OPD Triwulan I
 - 2.2. Realisasi Capaian Kinerja Program, Kegiatanb, Sub Kegiatan dan Anggaran Rencana Kerja
- BAB IV : FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA**
- 3.1. Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja
 - 3.2. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
- BAB IV : PENUTUP**
- 4.1. Kesimpulan
 - 4.2 Rekomendasi Tindaklanjut
 - 4.3 Tabel E.81

BAB II

CAPAIAN KINERJA RENJA BADAN KESBANGPOL TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Badan Kesbangpol

Keberhasilan suatu proses perencanaan dapat dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan RENJA setiap triwulannya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan dalam RENJA OPD. Hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan perencanaan Pembangunan di tahun mendatang.

Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar terlampir.

Tabel. 2.1.1
Visi, Misi, Tujuan
dan Sasaran

VISI RPJMD	Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang Berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah	
MISI 5 RPJMD	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	
TUJUAN		SASARAN
1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien		1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Untuk melihat sejauh mana Indikator Kinerja Utama pada Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1.2
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan I
Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Persentase (%)	Program kegiatan	Realisasi Anggaran (Rp)	Analisis (faktor pendukung/penghambat)
1	Meningkatnya Kondusifitas Daerah	persentase penurunan Konflik	100 %	25%	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan	0	Kegiatan terletak pada triwulan II
2	Meningkatnya penyelesaian potensi konflik di masyarakat		100 %	25%	program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	138.227.400	
3	Meningkatnya Stabilitas politik dan kehidupan demokrasi yang kondusif di daerah	Persentase pemantauan perkembangan Politik di daerah	100 %	25%	program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	0	Pemeriksaan LHP BPK RI terhadap Laporan pertanggung jawaban keuangan partai tahun 2024 belum keluar
		Presentase Organisasi masyarakat yang melaporkan keberadaannya	100 %	25%	Program pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	0	Kegiatan terletak pada triwulan II

2.2 Realisasi Capaian Kinerja Program, kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Rencana Kerja.

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.000.000 realisasi keuangan sebesar Rp. 0 atau 0% dan capaian fisik 0%.
- b) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar dengan anggaran sebesar Rp. 1.000.000 Realisasi Kinerja dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 atau 0% dan capaian fisik 0%.

2) Administasi Keuangan Perangkat Daerah

- a) Penyediaan gaji dan Tujuan ASN

Realisasi kinerja sesuai dengan target, semua Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Badan Kesbangpol Kab. Tanah Datar dengan Rp. 2.099.788.780,-, realisasi keuangan Rp. 604.852.268 atau 28.81% dan capaian fisik 12.40%.
- b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan dengan anggaran sebesar Rp. 1.000.000, realisasi keuangan Rp.0 atau 0%. dan capaian fisik 0%.

3) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a) Penyediaan Komponen Intansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Realisasi kinerja sesuai dengan target, instalasi listrik dan penerangan gedung Badan Badan Kesbangpol terpenuhi dan berfungsi dengan baik dengan Anggaran sebesar Rp. 500.000, realisasi Rp. 0 atau 0% dan capaian fisik 0%.

b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Realisasi kinerja sesuai dengan target, segala kebutuhan alat tulis untuk kelancaran tugas di Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar terpenuhi dengan baik dengan anggaran Rp. 10.000.000, realisasi Rp. 0 atau 0% dan capaian fisik 0%.

c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Realisasi kinerja sesuai dengan target, berupa cetak lembar disposisi, cetak kop surat, map dan penggandaan terpenuhi dengan baik dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000, realisasi Rp. 0 atau 0% dan capaian fisik 0%.

d) Fasilitas Kunjungan Tamu

Realisasi kinerja sesuai dengan target, semua kebutuhan makan minum untuk rapat internal badan Kesbangpol maupun tamu yang datang untuk keperluan koordinasi dan konsultasi terpenuhi dengan baik dengan anggaran Rp. 1.409.801, realisasi Rp. 0 atau 0% dan capaian fisik 0%.

e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Realisasi kinerja sesuai dengan target, kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah terlaksana dengan baik dengan anggaran Rp. 48.000.000 Realisasi Rp. 0 atau 0% dan capaian fisik 0%.

4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat SKPD

Realisasi kinerja sesuai dengan target, segala kebutuhan penunjang distribusi dan administrasi surat menyurat terpenuhi dengan baik, sehingga meningkatkan kelancaran pekerjaan dan pelayanan dengan anggaran Rp. 75.793.230 Realisasi Rp. 12.082.200 atau 15,94% dan capaian fisik 0.22%.

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Realisasi kinerja sesuai dengan target, kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik tersedia dengan baik dan lancar dengan anggaran Rp. 23.000.000,-, realisasi Rp. 0 atau 0% dan capaian fisik 0%.

c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Realisasi kinerja sesuai dengan target, pemeliharaan kebersihan Badan terlaksana selama 1 tahun dengan anggaran Rp. 1.700.000, realisasi Rp. 0 atau 0% capaian fisik 0%.

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas

Realisasi kinerja sesuai dengan target, telah terpenuhi semua kebutuhan untuk pemeliharaan 2 (dua) unit kendaraan dinas roda empat dan 4 (empat) unit kendaraan dinas roda dua dengan anggaran Rp. Rp. 83.600.000 realisasi Rp. 4.001.900 atau 4, 79% dan capaian fisik 0. 22%.

b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Realisasi kinerja sesuai dengan target dengan anggaran Rp. 3.000.000 dan realisasi Rp. 0 atau 0% dan capaian fisik 0%.

c) Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Badan dan Bangunan Lainnya

Realisasi kinerja sesuai dengan target, terealisasi berupa Pembayaran Honor 1 (satu) Orang THL dan perbaikan gedung Kantor dengan anggaran Rp. 25.900.000 dan realisasi Rp. 4.027.400 atau 15.55% dan capaian fisik 0.22%.

2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

1) Perumusan Kebijakan teknis dan Pemanfaatan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

- a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Bhinika Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Output sub kegiatan ini fasilitasi upacara hari besar nasional dengan anggaran Rp. 91.043.521 realisasi Rp. 0 atau 0% dan capaian fisik sebesar 0%.

- b) Sub Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka

Output sub kegiatan ini yaitu Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka tahun 2025 sehingga dalam pelaksanaannya masih belum maksimal dengan anggaran Rp. 2.000.000 realisasi Rp. 0 atau 0% dan capaian fisik sebesar 0%.

- c) Sub Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka

Output sub kegiatan ini yaitu Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka tahun 2025 sehingga dalam pelaksanaannya masih belum maksimal dengan anggaran Rp. 2.000.000 realisasi Rp. 0 atau 0% dan capaian fisik sebesar 0%.

- d) Sub Pembentukan Paskibraka

Output sub kegiatan ini yaitu fasilitasi pelaksanaan pembentukan Paskibraka tahun 2025 dalam dengan anggaran Rp. 800.000.000 realisasi Rp. 0 atau 0% dan capaian fisik sebesar 0%.

3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

- ### **1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksaaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pilkada serta Pemantauan politik di Daerah**

- a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pilkada serta Pemantauan politik di Daerah

Output sub kegiatan ini berupa fasilitasi pemberian bantuan keuangan kepada 11 (sebelas) Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Tanah Datar berdasarkan hasil pemilu tahun 2025-2029. Dengan anggaran Rp. 986.632.400 realisasi Rp. 0 atau 0% dan capaian fisik 0%.

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- a) Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Output ini Fasilitasi dan monitoring keberadaan Ormas dengan anggaran Rp. 2.000.000 realisasi Rp. 0 atau 0% dan capaian fisik 0%.

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

- a) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Output sub kegiatan ini berupa koordiansi dengan pihak terkait mengenai pencegahan peredaran minuman keras dan narkoba dengan anggaran Rp. 32.500.000, realisasi Rp. 0 atau 0% dan capaian fisik 0%.

6. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

1) Perumusan Kebijakan Tenis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

- a) Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah

Output sub kegiatan ini berupa terselenggaranya rapat-rapat forum Inteligen daerah dengan anggaran Rp 36.625.000 realisasi Rp. 7.500.000 atau 20.48% dan capaian fisik 0.11%.

- b) Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah

Output sub kegiatan ini berupa fasilitasi penanganan konflik yang terjadi ditengah masyarakat yang bekerjasama dengan Kodim 0307 Tanah Datar, Polres Tanah Datar dan Polres Kota Padang Panjang dengan anggaran Rp. 5.000.000, realisasi Rp. 0 atau 0% dan capaian fisik 0%

- c) Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah

Output sub kegiatan ini berupa fasilitasi pemantauan forum kewaspadaan dini masyarakat sebanyak 75 orang pada 75 Nagari se Kabupaten Tanah Datar dengan anggaran Rp. 323.893.000 realisasi Rp. 71.527.400 atau 22.08% dan capaian fisik 1.27%.

d) Pelaksanaan Forum Koordinasi pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Output sub kegiatan ini berupa fasilitasi rapat-rapat dengan FORKOPIMDA yang menyakut isue strategis Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 423.406.000 realisasi Rp. 59.200.000 atau 13.98% dan capaian fisik 2.50%.

BAB III FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

3.1. Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja

Berdasarkan identifikasi masalah pembangunan yang akan dibahas pada bagian setelah ini, maka dirumuskan faktor pendorong keberhasilan Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol dilakukan peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan.
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi vertikal, OPD, terkait dan stockholder lainnya.
3. Peningkatan kualitas SDM melalui diklat Itelijen dan diklat lainnya yang dapat meningkatkan kinerja dan pemahaman terhadap pekerjaan.
4. Melakukan peningkatan kuantitas, kualitas dan peran ASN pada SKPD dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, santun dan melayani sesuai nilai budaya adat Minangkabau melalui Reformasi Birokrasi dan revolusi mental.

3.2. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Faktor Penghambat pencapaian Kinerja pada Badan Kesbangpol berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah sebagai berikut:

1. Tingginya tingkat Pengedaran dan Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Tanah Datar
2. Banyaknya potensi konflik di Kab. Tanah Datar seperti tanah ulayat, tapal batas dengan Kabupaten/kota lain, pengelolaan objek wisata, Aliran Kepercayaan
3. Belum teridentifikasi jumlah ormas dan LSM di kabupaten Tanah Datar dikarenakan tidak didukung dengan anggaran
4. Belum adanya kesadarannya dari Ormas/LSM untuk melaporkan keberadaannya sehingga sulit untuk mengidentifikasi keberadaan dan aktifitas Ormas/LSM.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar sebagai lembaga teknis dari perangkat daerah Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya telah berupaya mencurahkan segala daya dan upaya untuk mencapai kinerja yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan. Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar yang telah ditetapkan.

Evaluasi Rencana Kerja Badan Kesbangpol Triwulan I Tahun 2025 merupakan suatu upaya bagi Badan Kesbangpol untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara terarah dan terpadu (holistik) sehingga program prioritas daerah dapat didukung oleh insan pertanian melalui program aksi, baik yang dibiayai melalui dana DAU sehingga tujuan dan sasarannya dapat diwujudkan secara bertahap.

Ukuran keberhasilan dan kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Tahun 2025 juga sangat ditentukan oleh dukungan sumber daya alam, SDM dan kapital yang ada. Oleh karena itu tema pembangunan 2025 yang ditetapkan oleh Badan Kesbangpol akan diimplementasikan melalui pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya seoptimal mungkin.

FORMULIR E.01
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANAH DATAR
TAHUN 2025

NO	Sasaran	Rek	Usanabidung usnan pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Capaian RPJMD TAHUN 2025(Ahkir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yg dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RENJA tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran renstra yang di evaluasi s/d 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RENSTRA yg dievaluasi s d 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Rupiah	K	Rupiah		K	Anggaran	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																					
1			KESETUAN BANGSA DAN POLITIK																					
1	01	01	PROGRAM PENJAJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Presentase Laporan Keuangan dan LAKP yang disusun tepat waktu		31.461.727,351	24.624.541,481	17.328.402,534			763.191,168		763.191,168					24.644.652,981				kesbangpol		
1	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Nilai Laporan keuangan dan LAKP		52.000,000	46.400,000	2.000,000			-		-					46.400,000						
1	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dalam penyusunan program dan kegiatan	12 Dokumen	29.000,000	22.400,000	10 Dokumen	2 Dokumen	1.000,000	-	Dokumen	-	-	-	-	10 Dokumen	22.400,000	80 %	2.240,00			
1	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan dalam penyusunan capaian kinerja	18 Laporan	24.000,000	20.000,000	12 Laporan	3 Dokumen	1.000,000	-	Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	24.000,000	67 %	2.400,00			
1	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase gaji ASN dan laporan penyusunan capaian kinerja serta penyusunan laporan keuangan akhir		5.162.639,670	4.146.271,696	2.191.786,780			604.852,268		604.852,268					4.146.271,696						
1	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tetapnya pembayaran gaji ASN	84 Bulan	5.154.639,670	50 Bulan	4.122.871,696	14 Bulan	2.190.786,780	4	bulan	604.852,268	4	bulan	604.852,268	28,79 %	11,73	56	Bulan	4.726.724,164	67 %	226,59
1	01	2.02	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan dalam penyusunan laporan keuangan akhir tahun	12 Laporan	26.000,000	8 Laporan	22.400,000	2 Dokumen	1.000,000	-	Laporan	-	-	-	-	8 Laporan	22.400,000	67	2.240,00			
1	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase unit kerja yang tertayani administrasi umum		649.616,000	646.652,000	61.969,861										646.652,000						
1	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	60 Jenis	5.800,000	40 Jenis	4.640,000	10 Jenis	500,000	-	Jenis	-	-	-	-	40 Jenis	4.640,000	67 %	-			
1	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	190 Jenis	153.000,000	124 Jenis	122.400,000	38 Jenis	16.000,000	-	Jenis	-	-	-	-	124 Jenis	122.400,000	66 %	1.224,00			
1	01	2.06	06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dibeli dan jumlah penggandaan	48 Jenis Cetak dan 15.000 lembar penggandaan	50.000,000	32 Jenis Cetak dan 2000 lembar penggandaan	44.000,000	8 Jenis Cetak dan 2000 lembar penggandaan	2.000,000	-	Jenis Cetak dan lembar penggandaan	-	-	-	-	32 Jenis Cetak dan 12.000 lembar penggandaan	44.000,000	67 %	2.200,00			
1	01	2.1	06	Penyediaan Bahan Baku dan Perundung Perundangan	Jumlah jenis bahan baku dan perundang-undangan	25 Jenis surat Kabar	41.500,000	5 Jenis	-	5 Jenis	-	-	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	01	2.06	06	Fasilitas Kurungan Tamu	Jumlah makan-minum rapat dan tamu yang disediakan	6 tahun	52.056,000	4 tahun	41.644,800	1 Tahun	1.409,801	-	burgkus nasi, dan	-	-	-	-	4 tahun	41.644,800	67 %	2.653,96			
1	01	2.06	06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dalam daerah dan luar daerah	6 Tahun	542.460,000	4 Tahun	433.968,000	1 Tahun	48.000,000	-	kali dalam daerah	-	-	-	-	4 tahun	433.968,000	67 %	904,10			
1	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usnan Pemerintahan Daerah			543.100,000	434.480,000	100.493,230			12.082,200		12.082,200					434.480,000						
1	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Sural Merajut	Jumlah materi dan perangko	6 Tahun	396.100,000	4 tahun	316.080,000	1 Tahun	79.753,230	-	Bulan	12.082,200	-	Bulan	12.082,200	15,94 %	3,06	4	tahun	328.162,200	67 %	432,97
1	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Telepon, Internet, Air dan kwah listrik	6 Tahun	130.000,000	4 tahun	104.000,000	1 Tahun	26.000,000	-	Bulan	-	-	-	-	4 tahun	104.000,000	67 %	452,17			
1	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis alat dan bahan kebersihan	6 Tahun	16.000,000	4 tahun	14.400,000	1 Tahun	1.700,000	-	Bulan	-	-	-	-	4 tahun	14.400,000	67 %	847,06			
1	01	2.08	06	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usnan Pemerintahan Daerah	Presentase pemeliharaan barang milik daerah untuk penunjang usnan Pemerintahan Daerah		613.321,600	658.698,800	112.500,000			8.629,300		8.629,300					658.698,800					
1	01	2.01	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan One atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang dibayar Pajak dan RKD	6 Tahun	641.163,600	4 tahun	512.930,800	1 Tahun	83.600,000	-	bulan	4.001,900	-	bulan	4.001,900	4,79 %	0,62	4	tahun	516.932,700	67 %	616,34
1	01	2.06	06	Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Komputer (PC) yang dipelihara	6 Tahun	27.000,000	4 tahun	21.600,000	1 Tahun	3.000,000	0	Tahun	-	0	Tahun	-	-	4 tahun	21.600,000	67 %	720,00		
1	01	2.06	09	Pemeliharaan/Rahibalisasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	6 Tahun	145.160,000	4 tahun	116.128,000	1 Tahun	25.900,000	0	bulan	4.027,400	0	bulan	4.027,400	15,55 %	2,77	4	tahun	120.155,400	67 %	463,52
1	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap wawasan kebangsaan		682.268,002	545.814,402	91.043,521										545.814,402						
1	01	02	01	Penusunan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			682.268,002	545.814,402	91.043,521									545.814,402						
1	01	02	01	01	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembinaan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sehat Kebangsaan	Jumlah Lokasi Penyuluhan Bela Negara	60 upacara	682.268,002	40 kali upacara	545.814,402	15 kali upacara	91.043,521	-	kali upacara	-	-	-	-	52 kali upacara	545.814,402	87 %	590,51		
					Pembinaan terhadap aktifitas kepelabakaan dan purna Pasikbraka	Jajanan hasil pembinaan purna pasikbraka	-	-	3.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Pembentukan pasikbraka	Jumlah pasikbraka	-	-	600.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	01	03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan yang berlaku		16.940.667,479	13.662.526,983	13.541.722,942										13.662.526,983						
1	01	03	01	Penusunan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pembinaan Usnan/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantapan Situasi Politik			16.940.667,479	13.662.526,983	13.541.722,942									13.662.526,983						

